

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 1993-2012**



ARTIKEL PUBLIKASI

Di Susun Oleh :

UMMI CHOLIFAH

B 300100007

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA
2014**

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, setelah membaca artikel publikasi ini dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN
PENDAPATAN HASIL DAERAH (PAD) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
1993-2012.**

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh :

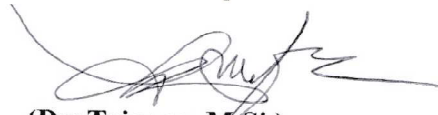
UMMI CHOLIFAH

B 300 100 007

Penandatanganan berpendapat bahwa artikel publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta , Juni 2014


Pembimbing


(Drs.Triyono, M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Triyono, M.Si.)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 1993-2012

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor tersebut meliputi : PDRB, jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan penerimaan pemerintah..

Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data *Time series*, yang merupakan arsip dari kantor BPS Boyolali Tahun 1993-2012. Model estimasi yang digunakan adalah Analisis regresi OLS (*Ordinary least square*).

Dari hasil uji asumsi klasik untuk uji multikolinieritas ini menunjukkan ada masalah multikolinieritas pada variabel PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan yang tidak ada masalah multikolinieritas hanya variabel inflasi. Untuk uji heteroskedastisitas tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model. Dalam uji autokolerasi juga tidak terdapat autokolerasi, untuk uji normalitas residual menunjukkan distribusi u_t normal, dan dalam uji spesifikasi model dengan menggunakan uji *Ramsey-Reset* menunjukkan model yang digunakan linier.

Dari hasil uji validias pengaruh (Uji t), diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil uji kelayaka model (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PAD).

Kata kunci : PAD, Inflasi, pengeluaran pemerintah, *regresi OLS*.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Dalam beberapa tahun ini, di dalam melaksanakan pembangunan telah ditempuh berbagai upaya perbaikan dalam sektor keuangan daerah. Demikian juga terus dilaksanakan pengarahannya serta pengelolaan pemerintah daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan pengelolaan keuangan Negara berbagai kebijakan ditempuh pemerintah yang merupakan pencerminan UU No 22 tahun 1999 diarahkan agar pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2006-2010 mengalami kenaikan terus menerus. Dan pada tahun 2006 mencapai angka 59.307.283.906 selanjutnya tahun 2007 mengalami kenaikan mencapai angka 67.437.551.010, tahun 2008 yang mencapai angka 63.733.408.461. pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 70.004.658.137, dan tahun 2010 mengalami pertumbuhan pendapatan asli daerah mencapai angka 86.365.014.311.

Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan didaerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat yang memiliki kepentingan yang sama dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah terutama dibidang keuangan daerah diberi

kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

Kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan pengenaan pajak dan pungutan pajak tergantung pendapatan asli daerah, tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga ditingkat daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah mempekerjakannya, meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari suatu instansi lain (Arsyad, 2000:10)

Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah inilah yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 1993-2012 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 1993-2012.

LANDASAN TEORI

1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi suatu daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara *persial* yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 1999).

3. Definisi pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah menurut UU no.22 tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya didalam pasal 4 UU no. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah, sumber pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah.

4. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga pada akhirnya dapat diharapkan agar dapat mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya dapat ditempuh melalui (Halim,2001:113-114).

5. Produk domestik regional bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari semua barang dan jasa (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu atau satu tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dapat digunakan tiga cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (sadono sukirno,1994).

6. Jumlah Penduduk

Dinegara sedang berkembang yang mengalami peledakan jumlah penduduk termaksud Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap Negara,dengan demikian tiap Negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (sucipto wirosardjono:1998).

7. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

8. Penerimaan pemerintah

Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha juga meningkat.

METODE PENELITIAN

1. Regresi linier berganda

Alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode OLS (*ordinary least square*). Adapun data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan alat analisis tersebut akan diperoleh koefisien pengaruh

dari masing-masing variabel independen. Sedangkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + u_t$$

2. Uji asumsi klasik

Adapun uji asumsi klasik yang akan diujikan dalam penelitian ini meliputi : uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji otokorelasi, dan uji normalitas residual. Uji tersebut dimaksudkan untuk memutuskan apakah taksiran-taksiran terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik.

3. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependent.

4. Uji Kebaikan Model

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang dipakai eksis atau tidak untuk digunakan sebagai estimasi.

b. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai R^2 menunjukkan sebagian besar variasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independen yang ada dalam persamaan model regresi.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Regresi Linier Berganda

Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model ini dimaksudkan untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk (JP), tingkat penerimaan pemerintah (PP), inflasi (INF) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Model persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan pada BAB Metodologi Penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Log}(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(\text{PDRB}_t) + \beta_2 \text{Log}(\text{JP}_t) + \beta_3 \text{Log}(\text{PP}_t) + \beta_4 \text{INF}_t + U_t$$

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji spesifikasi model (uji ramsey-reset)

Pada penelitian ini digunakan uji *Romsey Reset* yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau *general test of specification error*. jika nilai $F_{\text{statistik}}$ sebesar $0,6443 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Kesimpulan : model yang digunakan linier (spesifikasi model benar).

b. Uji normalitas U_t

Uji normalitas U_t yang digunakan disini adalah uji Jarque Berra. jika nilai χ $0,7344 \leq 0,05$ sehingga H_0 diterima. Kesimpulan : Distribusi U_t normal (hipotesis *Null* : distribusi normal diterima).

c. Uji multikolinieritas

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan metode Klien. Apabila $R_i^2 < R^2$ maka tidak ada multikolinearitas dan bila $R_i^2 > R^2$ maka ada multikolinearitas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dengan menggunakan Uji Klien didapatkan hasil sebagai berikut:

$$R^2 = 0,983$$

$$R_1^2 = 0,992$$

$$R_2^2 = 0,993$$

$$R_3^2 = 0,122$$

$$R_4^2 = 0,985$$

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas ini menunjukkan ada masalah multikolinieritas pada variabel PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan yang tidak ada masalah multikolinieritas hanya variabel inflasi. Multikolinieritas terjadi pada variabel ini karena hamper tidak mungkin variabel ekonomi tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuni Prihadi Utomo (EKSPLORASI DATA dan ANALISIS REGRESI dengan SPSS 2009) yang mengatakan bahwa multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti diantara satu atau lebih variabel independen dalam model.

d. Heteroskedastisitas

untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan menggerakkan metode uji *White*. Jika $0,1097 < 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model.

e. Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch–Godfrey*. Jika $0,7556 > 0,05$
Kesimpulan : H_0 diterima artinya tidak terjadi autokorelasi pada pengujian model.

3. Uji validitas pengaruh (uji t)

Uji statistik ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara dua sisi (*two tail*).

- Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada pengujian t menunjukkan signifikan t_i sebesar $0,9926 > 0,05$ maka jadi H_0 ditolak. Kesimpulan: Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Boyolali dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

- Variabel jumlah penduduk (JP)

- Pada pengujian t menunjukkan signifikan t_i sebesar $0,9939 > 0,05$ maka jadi H_0 ditolak. Kesimpulan: Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Boyolali dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

- Variabel laju inflasi (INF)

Pada pengujian t menunjukkan signifikan t_i sebesar $0,1220 > 0,05$ maka jadi H_0 ditolak. Kesimpulan: Variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Boyolali. dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

- Penerimaan pemerintah (PP)

Pada pengujian t menunjukkan signifikan t_i sebesar $0,9858 > 0,05$ maka jadi H_0 ditolak. Kesimpulan: Variabel penerimaan pemerintah Perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Boyolali dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

4. Uji kebaikan model

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan eksis atau tidak. Nilai signifikan statistik F sebesar $0,000 < 0,05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis sehingga dengan demikian variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan penerimaan pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.

b. Koefisien determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan sebagian besar variasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independen yang ada dalam persamaan model regresi. Dari hasil estimasi persamaan tersebut,

besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,983. Artinya 98,3% variasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten boyolali tahun 1993-2012 dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model statistik. Variabel independen dalam model statistik yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk (JP), inflasi (INF), dan penerimaan pemerintah (PP). 1- 0,983 variasi variabel peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model statistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa regresi berganda dengan metode *Ordinary least square* (OLS) tentang pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, laju inflasi, penerimaan pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik untuk uji multikolinieritas ini menunjukkan ada masalah multikolinieritas pada variabel PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan yang tidak ada masalah multikolinieritas hanya variabel inflasi. Untuk uji heteroskedastisitas tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model. Dalam uji autokolerasi juga tidak terdapat autokolerasi, untuk uji normalitas residual menunjukkan distribusi u_t normal, dan dalam uji spesifikasi model dengan menggunakan uji *Ramsey-Reset* menunjukkan model yang digunakan linier.
- Dari hasil uji kelayakan model nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,983 atau 98,3% yang menunjukkan variasi variabel peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 1993-2012 dapat dijelaskan oleh variasi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, laju inflasi dan penerimaan pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 1,7% dijelaskan variasi variabel-variabel bebas lain diluar model yang diteliti.

- Dari hasil uji kelayakan model (uji F), Nilai signifikan statistik F sebesar $0,000 < 0,05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis sehingga dengan demikian variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan penerimaan pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.
- Dari hasil uji validasi pengaruh (Uji t), diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali. Sedangkan variabel jumlah penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, Purbayu, 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Kediri*, Dinamika pembangunan Vol.2 No. 1 / IuII 2000.
- Eka Sari, Sony, 2000. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi*, Skripsi Strata 1 UMS, Tidak di terbitkan.
- Gujarati Damodar, 1995, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Kantor Statistik Kota Boyolali, Berbagai Tahun, *Kabupaten Boyolali dalam Angka*, Boyolali.
- Karjo Redjo, Sardi .1999, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2001. *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Mangkusubroto, Guritno, 1995. *Ekonomi Publik*, PBFE UGM, Yogyakarta.
- Nopirin, 1996, *Ekonomi Makro*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, BPFE, Yogyakarta.
- Riduansyah, Muhammad, 2003. *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus di kota Bogor)*, *Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Risnawati, Aan, 2001. *Analisa Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Surakarta*, Skripsi Strata I UMS, Tidak di terbitkan.
- Riwu Kaho, Yosef, 1985. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Biru Aksara, Jakarta.
- Rudini, 1995. *Otonomi Daerah dan Tantangan* , PT Sinar Agape Press, Jakarta.
- Silalahi, TB, 1995. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, PT Sinar Agape Prese, Jakarta.
- Soesastro, Hadi, 2001. *Otonomi Daerah dan free Internal Trade*, CSIS and ANU.
- Sukirno, Sadono, 1974. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Jakarta.
- Susilo, Y, Sri, 2002. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral*, Empirika, Surakarta.
- Triyanto Widodo, Suseno, 2004. *Indicator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*.